

BAB 1

PENDAHULUAN

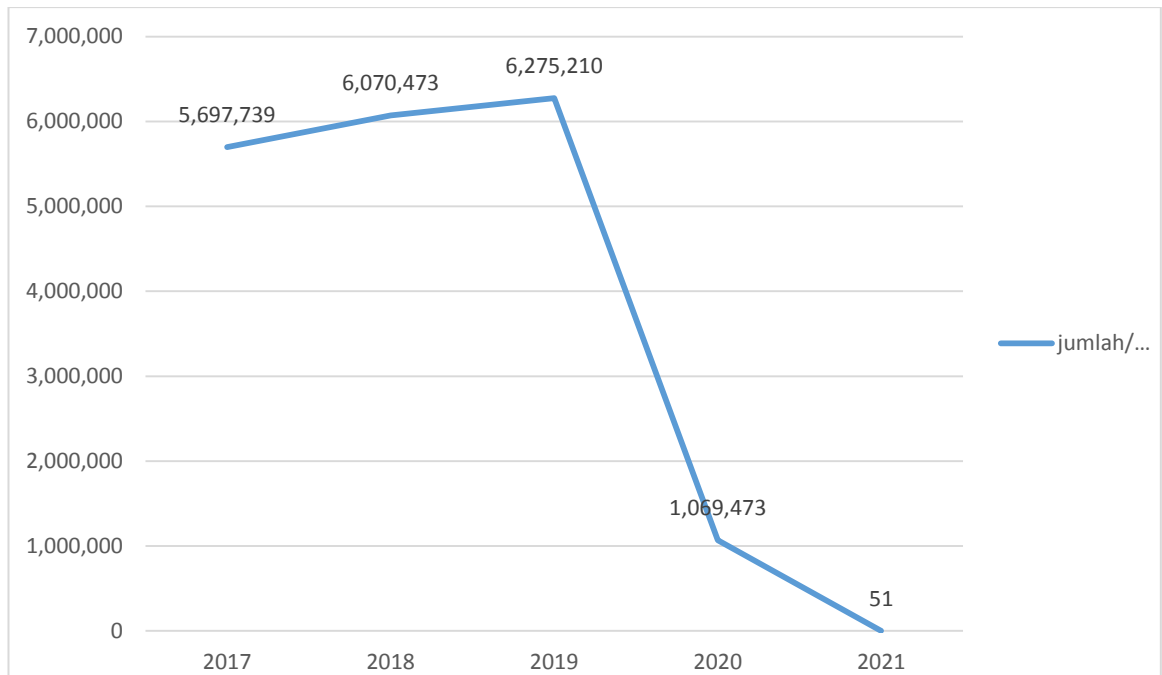
1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *digital tourism* sebagai bentuk upaya pemulihan perekonomian masyarakat, yang berada pada wilayah kota wisata Bali pada masa Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 terjadi pada bulan Desember akhir, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan menyebar diseluruh dunia termasuk di Indonesia khususnya di Provinsi Bali (Nabila et al., 2021). Virus ini menyerang system pernafasan ringan (flu), namun dapat menyebabkan gangguan pernafasan berat (peunomoniam) (Pane, 2021). Wabah virus ini yang mudah di tularkan melalui hidung mulut dan tangan sehingga dalam upaya untuk mengurangi penyebaran yang semakin bertambah pemerintah melakukan pembatasan sosial (Rijal et al., 2021).

Adanya peraturan pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah memberi dampak terhadap beberapa sektor salah satunya pariwisata (Muhid & Muslimin, 2020). Sektor pariwisata di Indonesia merupakan keadaan dinamis yang mampu menjadi salah satu sumber kontribusi devisa negara (Jamalina & Wardani, 2017). Selain itu pariwisata merupakan fenomena penting yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi budaya (Muhid & Muslimin, 2020). Diharapkan pariwisata Indonesia dapat mempunyai pengaruh yang luas terhadap perekonomian sehingga dapat menjadi sector unggulan.

Banyak tempat wisata yang mengalami penutupan membuat sektor pariwisata mengalami kerugian (Pambudi et al., 2020). Pariwisata yang bukan termasuk kegiatan esensial mendapatkan larangan mengenai kegiatan pembatasan sosial (Lie & Jovita, 2020). Penutupan sektor destinasi wisata yang ada di Bali merupakan salah satu kegiatan untuk meminimalisir persebaran Pandemi COVID-19. Selain bentuk antisipasi persebaran Pandemi COVID-19 yang semakin meluas terjadi penutupan destinasi wisata juga berpengaruh terhadap jumlah angka pengangguran yang semakin bertambah (Lidyana, 2021). Data BPS per Februari tahun 2020 posisi angka pengangguran Provinsi Bali, jika di urutkan secara nasional termasuk dalam kategori tinggi yaitu urutan 18 dengan besaran 5,63 persen, keadaan sebelum terjadi pandemi atau keadaan normal angka pengangguran di Provinsi Bali hanya sebesar 1,2-1,3 persen (Julita, 2021). Bertambahnya jumlah pengangguran juga di dukung dengan penurunan jumlah wisatawan mancanegara, hal tersebut sejalan dengan larangan sementara orang asing masuk kenegara Indonesia yang sesuai dengan peraturan Menurut Menteri Hukum dan HAM, bertambahnya jumlah pengangguran berimplikasi terhadap penurunan kunjungan wisata (Prasetya, 2021).

Gambar 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Ke Provinsi Bali, Tahun 2017-2021



Sumber : (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020)

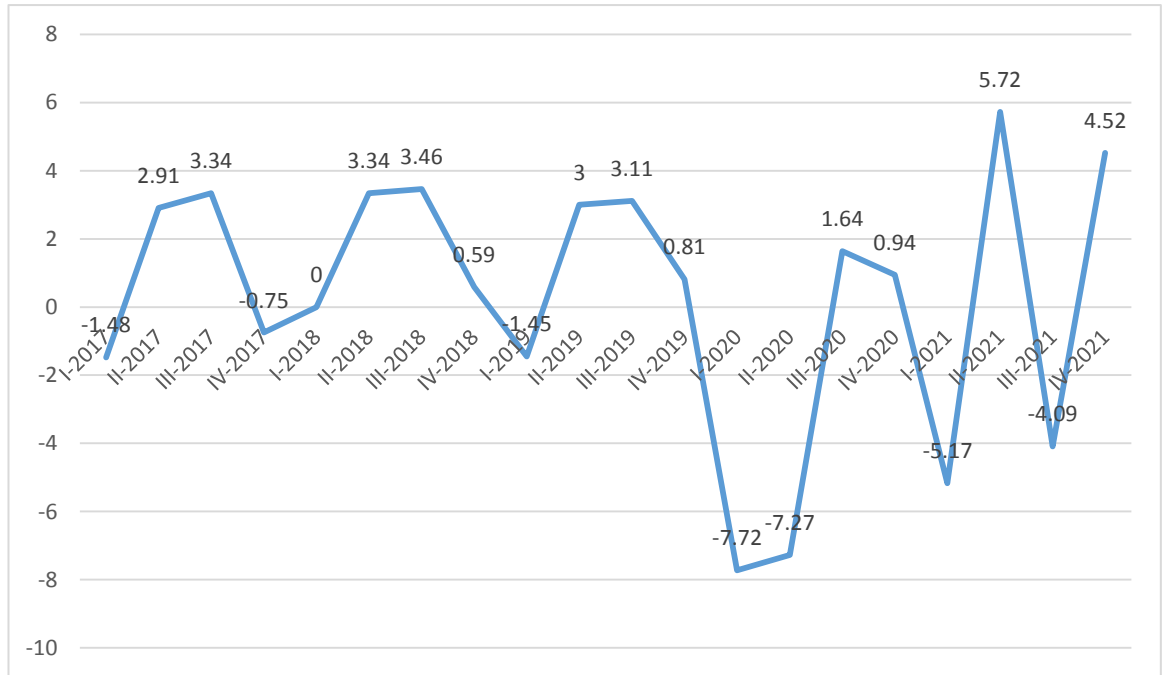
Pada gambar 1 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan asing ke Bali tahun 2020 mengalami penurunan signifikan yaitu kurang lebih sebesar 5 juta pengunjung, angka tersebut memiliki perbedaan yang cukup jauh dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisata asing yang datang ke Provinsi Bali sangat sedikit hanya sebesar 51 orang hal ini di sebabkan oleh beberapa peraturan kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang warga negara asing datang ke Indonesia (Gianie, 2022). Tahun 2021 merupakan kunjungan yang paling rendah selama 5 tahun terakhir, hal tersebut bertolak belakang dengan jumlah kunjungan wisata asing yang datang ke Provinsi Bali pada tahun 2019 dengan jumlah total kunjungan sebesar 6 juta kunjungan

wisatawan (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020). Jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami kemerosotan menyebabkan sektor-sektor pendukung pariwisata juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Lumanwauw, 2018).

Pariwisata merupakan salah satu jenis usaha industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hanoatubun, 2020). Pariwisata mempunyai dampak positif terhadap kondisi lingkungan yang berada dikawasan wilayah pariwisata dimana dapat memberi lapangan kerja, dapat melakukan usaha formal dan nonformal serta dapat memberi sumbangan terhadap pendapatan pemerintah baik pusat ataupun daerah (Soritua, 2017). Pandemi COVID-19 memiliki dampak terhadap perekonomian yang berada pada daerah wisata seperti Provinsi Bali, mengingat sebagian besar perekonomian Provinsi Bali didukung oleh sektor pariwisata (Yakup, 2019). Terbukti bahwa saat ini Provinsi Bali mengalami kontraksi yang paling parah dengan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi (BEM FEB Bali, 2020) Penurunan ekonomi dilihat berdasarkan pertumbuhan PDRB Provinsi Bali (Yasa & Arka, 2015). Hal tersebut dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.2

**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan (q-to-q),
2017-2021 di Provinsi Bali (Persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, (2021)

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa tahun 2020 triwulan pertama mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar -7,72 persen. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan PDRB pada triwulan pertama tahun 2020 merupakan pertumbuhan yang paling rendah, hal ini menjadi *negative shocks* terhadap ekonomi yang ada dikawasan Bali karena jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan. Selanjutnya pada tahun yang sama ditriwulan kedua PDRB sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen. Selain itu pada triwulan pertama dan ketiga tahun 2021 pertumbuhan produk domestik bruto

mengalami penurunan kembali diangka -5,17 dan -4,09 persen. Ditahun yang sama PDRB Provinsi Bali mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 5,72 ditriwulan kedua dan 4,52 pada triwulan ke empat, hal tersebut menjadi harapan bahwa pertumbuhan PDRB dapat meningkat kembali (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020). Penurunan PDRB yang terjadi disebabkan oleh beberapa sektor seperti usaha kecil dan menengah (UMKM) dan destinasi wisata. Sejak adanya peraturan tentang pembatasan sosial sektor ekonomi mengalami penurunan hal tersebut berimbas terhadap pertumbuhan PDRB (Jessen & Hendro, 2021). Sehingga dengan adanya penurunan PDRB di Bali berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat disektor UMKM dan destinasi wisata.

UMKM merupakan salah satu yang mengalami penyusutan pendapatan akibat adanya Pandemi COVID-19 , hal tersebut karena terdapat pembatasan sosial dan *lockdown* yang diterapkan oleh pemerintah (Sutrisno, 2020). Selain itu langkah tersebut telah menghentikan aktifitas perekonomian, secara langsung mengalami perubahan permintaan terhadap barang dan jasa yang dijual. Aktifitas perekonomian yang mengalami perubahan secara tiba-tiba dapat dapat menjadikan masyarakat yang berada dikawasan wisata mengalami gulung tikar (Thaha, 2020). Pandemi COVID-19 berdampak terhadap kondisi perekonomian UMKM yang ada di Provinsi Bali (S. Ayu & Regitha, 2020).

Kontribusi UMKM sangat besar terhadap ekonomi, sebanyak 326 ribu unit usaha UMKM, menjadi salah satu yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan pusat yaitu mencapai 99 persen (Silalahi & Ginting, 2020). Pandemi COVID-19 melemahkan UMKM, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan

aktivitas penjualan (Balitbang, 2021). Sebanyak 68 persen aktifitas penjualan mengalami penurunan, 12 persen mengalami kesulitan modal, 10 persen kesulitan bahan baku, 6 persen terjadi kesulitan produksi dan 4 persen mengalami penurunan omzet (I. W. Sukarsa, 2021). Melemahnya ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19 memiliki pengaruh drastis terhadap UMKM di Bali.

Disisi lain sektor pendukung pariwisata seperti hotel, resort, restoran, dan retail juga mengalami dampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kawasan wisata Provinsi Bali (Urbanus & Febianti, 2017). Saat keadaan normal, hotel dapat menampung *okupansi* atau tingkat hunian kamar lebih dari 65-75 persen namun adanya Pandemi COVID-19 tingkat hunian kamar hanya dapat menampung 50-55 persen saja, hal tersebut terjadi penurunan sebesar 15-25 persen (Aditya, 2021a). Selain perhotelan sektor pendukung ekonomi yang terkena dampak COVID-19 yaitu restoran, tidak adanya pembeli yang berkunjung terpaksa membuat restoran menutup jam operasionalnya (Andri, 2021). Kurang adanya dukungan dari biro perjalanan dan banyaknya tempat pariwisata yang ditutup sehingga banyak pemilik restoran yang lebih memilih tutup sementara dibandingkan buka (Puwahita et al., 2021). Ritel juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Bali (Fajar, 2021). Banyaknya pelaku sektor usaha dibidang ritel berpotensi terjadi penurunan omzet sebesar 15-20 persen hal tersebut karena adanya pembatasan operasional disejumlah tempat yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah positif angka pandemi COVID-19 (Sugiari, 2021)

Bali dikenal akan budaya, kekayaan alam, lingkungan serta seni yang khas, hal tersebut yang menjadi sorotan bahwa Bali merupakan tujuan wisata di Indonesia (Paramita & Putra, 2020). Adanya Pandemi COVID-19 dan juga pembatasan mobilitas sosial menjadikan kawasan wisata yang ada di Provinsi Bali terkena dampak yang cukup serius sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap kemerosotan perekonomian (Kusuma, 2020). Terganggunya aktivitas pariwisata karena adanya Pandemi COVID-19 membuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkaraf) memberi pedoman global sebagai bentuk rasa aman wisatawan yang terdiri dari tiga kunci kata; 1) Kebersihan; 2) Kesehatan; 3) Keamanan (Kemenparekraf, 2020). Hal tersebut karena pemerintah ingin memberikan kepercayaan terhadap wisatawan bahwa saat ini melakukan kunjungan pariwisata dapat dilakukan secara sehat aman dan nyaman, disamping itu tiga komplemen tersebut merupakan salah satu bentuk percepatan pemulihan ekonomi.

Pemulihan ekonomi sektor pariwisata di Provinsi Bali sangat penting dilakukan, karena mayoritas masyarakat bergantung terhadap sektor pariwisata seperti halnya tenaga kerja, jasa, pelaku usaha dan industry (Kemenkeu, 2020). Pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga terus melakukan pembaharuan strategi pariwisata sebagai salah satu pemulihan ekonomi nasional (DJKN Kemenkeu, 2020). Melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah saat ini sedang menggencarkan pemulihan ekonomi melalui *digital tourism* (Puspawati & Ristanto, 2018). *Digital tourism* merupakan salah satu bentuk strategi pemerintah untuk memperkenalkan destinasi wisata melalui

platform media digital (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021). Diharapkan dengan adanya *digital tourism* sebagai salah satu pemulihan ekonomi menjadikan sektor pariwisata dapat bangkit dan dapat berkontribusi terhadap APBN/APBD.

Banyaknya penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang pemulihan ekonomi pariwisata dimasa Pandemi COVID-19, namun sedikit peneliti yang mengkaji tentang pemulihan ekonomi menggunakan *digital tourism*. Pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu dapat digunakan sebagai kajian ulang bagi pemerintah dalam melakukan pembuatan peraturan/kebijakan, saran/pertimbangan mengenai pemulihan ekonomi masyarakat khususnya di Provinsi Bali akibat dampak Pandemi COVID-19. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk dapat memulihkan ekonomi masyarakat Provinsi Bali dapat dilakukan dengan menggunakan *digital tourism* sebagai salah satu jalan keluar, mengingat adanya Pandemi COVID-19 sektor ekonomi pariwisata mengalami kontraksi hebat terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut disebabkan mayoritas masyarakat Bali menggantungkan hidupnya disektor pariwisata.

Maka tujuan penelitian ini diharapkan mampu mengelaborasi kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan yang ada di Bali selama masa Pandemi COVID-19. Selanjutnya peneliti menganalisa melihat lebih detail apa yang dilakukan pemerintah dan para pihak pelaku usaha pariwisata untuk menjalankan pariwisata agar tetap berjalan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan potret dampak sektor pariwisata dan pemulihan ekonomi masyarakat selama masa Pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan dalam bentuk *review* dengan penggunaan data sekunder untuk

memberikan deskripsi hingga mendapatkan kesimpulan dan menggunakan model *time series* tahun 2017-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah di jelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi *digital tourism berbasis website* yang diterapkan selama Pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi Bali?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam pemulihan perekonomian masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji implementasi *digital tourism berbasis website* yang diterapkan selama Pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi Bali?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam pemulihan perekonomian masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi Bali?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai kajian ulang, saran/pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan pembuatan peraturan/kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemulihan ekonomi masyarakat menggunakan *digital tourism* khususnya di Provinsi Bali.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan dasar yang digunakan sebagai acuan dalam mempertimbangkan atau membandingkan variabel. Tujuan dari penelitian terdahulu yakni menemukan perbedaan dan *novelty* dari beberapa penelitian sebelumnya, sehingga dapat menemukan penelitian terbaru dalam sebuah penelitian (Rasul, 2019). Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan kegiatan dalam sektor pariwisata, dampak pandemic COVID-19 terhadap ekonomi, peran pemerintah dan dampak COVID-19 terhadap keberlanjutan pariwisata dalam pembangunan sektor pariwisata.

Menurut Putra & Nuh, (2021) dalam jurnal berjudul “Kajian Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanganan Pandemi COVID-19” yang membahas tentang pengimplementasian kebijakan baru yaitu pembatasan kegiatan masyarakat di kota Semarang. Hasil penelitian ini yaitu bahwa implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di kota Semarang menunjukkan pelaksanaan PKM melalui peraturan walikota, lalu dikomunikasikan dengan dinas kesehatan dan satgas COVID-19 bahwa sudah melakukan dukungan terhadap beberapa fasilitas seperti bantuan makanan, rumah sakit, tempat isolasi dll

Implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di perkuat oleh tulisan (WD Tuti, 2020) dengan jurnal berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan *Work From Home* Pada Kesejahteraan Driver Transportasi Online di Indonesia” yang membahas penerapan Kebijakan *Work From Home* (WFH) terhadap

kesejahteraan pengemudi transportasi online. Hasil penelitian ini yaitu bahwa kebijakan WFH menurunkan tingkat kesejahteraan para pengemudi transportasi online hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat kebutuhan yang belum terpenuhi.

Selain itu didukung dengan adanya tulisan (Sumarni, 2020) dengan jurnal berjudul “Implementasi Kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru di Bidang Pariwisata Study Kasus di Kabupaten Gunungkidul”. Membahas terkait implementasi kebijakan baru yang dikeluarkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dalam adaptasi kebiasaan baru disektor pariwisata. Hasil penelitian ini yaitu bahwa adanya implementasi adaptasi kebiasaan baru membuka kembali bisnis yang ada dibidang pariwisata dengan menerapkan protocol kesehatan, dan adanya beberapa SOP yang harus ditaati oleh pelaku bisnis pariwisata.

Implementasi kebijakan pembatasan sosial berdampak terhadap sektor pariwisata hal tersebut sesuai dengan tulisan Priyanto et al., (2020) dengan judul “*The Impact of COVID-19 on Local tourism Sector and Income*” Penelitian ini membahas tentang dampak Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap pendapatan dan pariwisata local. Hasil penelitian ini yaitu sebelum adanya Pandemi COVID-19 orang-orang disekitar objek pariwisata yang terlibat dalam pembangunan komunitas pariwisata umumnya memiliki pendapatan, namun ketika Pandemi COVID-19 melanda memberi dampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat yang berada dikawasan pariwisata.

Penurunan jumlah kunjungan dan pendapatan sektor pariwisata pemerintah mempunyai opsi lain dalam meningkatkan kunjungan pariwisata melalui strategi *digital tourism* yang diperkuat dengan jurnal tulisan Susilo, (2020) dengan judul “*Unlocking the Strategy of Indonesian Government in Developing Digital Tourism*”. Membahas tentang pemahaman sejauh mana *digital tourism* dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia serta strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan pengembangan *digital tourism*. Hasil penelitian ini yaitu bahwa dengan memanfaatkan strategi digital kemitraan dengan badan usaha milik negara, perusahaan dan masyarakat Indonesia secara konsisten mempersiapkan infrastruktur dan insentif untuk mendukung *digital tourism* dalam 4 aspek seperti, distribusi digital, promosi digital, pembayaran digital dan pelatihan digital.

Digital tourism sebagai alat pendukung ekonomi pariwisata mempunyai peran penting dalam prospek pengembangan pariwisata, hal tersebut sesuai dengan tulisan Kayumovich, (2020) dengan judul jurnal “*Prospects Of Digital Tourism Development*” Penelitian ini membahas tentang prospek pengembangan pariwisata digital. Hasil penelitian ini bahwa *digital tourism* diharapkan menjadi bisnis pariwisata tidak hanya lebih fleksibel, namun dapat konsisten dengan realitas zaman sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi pariwisata yang lebih tinggi.

Menurut Frolova et al, (2019) berjudul “*Digital Economy in the Management System of Tourism Enterprises*”. Penelitian ini membahas secara khusus tentang analisis ekonomi digital dalam system manajemen perusahaan pariwisata, Hasil penelitian ini bahwa perkembangan ekonomi digital dalam

pariwisata memberi peluang untuk komunikasi dan bertukar informasi melalui platform internet sehingga memunculkan ide dan menciptakan bisnis pariwisata, pencarian karyawan, dan jasa pariwisata.

Dalam melakukan analisis ekonomi digital dalam usaha pariwisata memerlukan upaya pemulihan ekonomi hal tersebut sesuai dengan tulisan Prohorovs, (2020) dengan judul “*Problems of Economic Recovery Planning after the COVID-19 Pandemic* ” Penelitian ini membahas fitur dan masalah terkait dengan penyusunan rencana pemulihan ekonomi setelah Pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pembangunan ekonomi mempunyai aspek yang harus diperhitungkan ketika menyusun rencana pemulihan dan pengembangan ekonomi.

Menurut Purnomoratih, (2021) dalam jurnal berjudul “Efektifitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan” Penelitian ini membahas tentang efektivitas program pemulihan ekonomi (PEN) dalam menopang tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang menjadi program pemerintah pusat dapat menopang tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung juga meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi pariwisata, menurut (Asmini et al., 2020), dengan judul “Manajemen *Business Cycle* sebagai basis Peluang Usaha Pasca Pandemi COVID-19: Strategi

Pemulihan Ekonomi Masyarakat”. Hasil penelitian yaitu bahwa Analisa *Manajemen Business Cycle*/pengelolaan sistem bisnis melalui berbagai perencanaan yang dilakukan maka siklus bisnis dapat menggambarkan jenis bisnis pada bidang usaha dan peluang pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

Penelitian terdahulu merupakan acuan yang digunakan pada saat melakukan penelitian, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis diantaranya: pada penelitian terdahulu membahas terkait kebijakan pembatasan sosial dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 yang semakin massif, selain itu kebijakan pembatasan sosial dilakukan di beberapa wilayah, hal tersebut menimbulkan problem baru terhadap perekonomian pariwisata yang berimplikasi terhadap pendapatan ekonomi, dengan dampak yang ditimbulkan perlu adanya pemulihan ekonomi pariwisata melalui strategi-strategi yang dilakukan pemerintah. Sementara Provinsi Bali menggunakan pemulihan ekonomi masyarakat melalui *Digital tourism* digunakan sebagai alat dalam membangkitkan kembali ekonomi pariwisata yang ada di kawasan Provinsi Bali. Dengan harapan sektor pariwisata dapat bangkit lagi dengan kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan yang ada di Provinsi Bali selama masa Pandemi COVID-19, dapat menopang tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan pariwisata, serta melihat apa peran pemerintah dan para pihak pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan usahanya disituasi pandemi COVID-19 itu sektor pariwisata dapat berjalan beriringan dengan adanya pandemi COVID -19.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sebuah proses penerapan melalui gagasan, konsep, inovasi yang dilakukan melalui tindakan yang dapat memberi perubahan dengan adanya keterampilan, pembelajaran serta pengetahuan (Farih, 2021). Kebijakan yaitu salah satu peraturan pemerintah yang ada dalam pembuatan kebijakan kemudian diimplementasikan dalam sebuah pelayanan (Sumarni, 2020). Implementasi kebijakan digunakan untuk mencapai sebuah maksud tertentu dirumuskan melalui kebijakan dan dilakukan oleh pihak berwajib seperti pemerintah (Tri et al., 2019). Proses implementasi baru bisa dijalankan apabila sasaran dan tujuan sudah ditetapkan dengan program dan perkiraan dana yang sudah disiapkan telah disalurkan untuk mencapai sasaran (Tuwu et al., 2021). Apabila pemahaman implementasi kebijakan tersebut diarahkan pada kebijakan publik maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aksi yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama (Wibawa, 2012). Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebuah tahapan yang dilakukan dengan unsur kebijakan, tahapan ini yang dapat menentukan hasil tidak perencanaan kebijakan (Timmerman et al., 2021). Menurut Wahab dalam (Saraswaty, 2018) suatu kebijakan dapat saja gagal apabila dalam pengimplementasiannya salah yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor berikut: 1) dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat

bekerja sama dengan kebijakan yang telah ditetapkan; 2) pihak yang telah menyetujui untuk bekerjasama tidak menjalankannya secara maksimal dan tidak efisien; 3) pihak yang terlibat dalam menjalankan kebijakan tidak menguasai apa yang menjadi permasalahan; 4) permasalahan yang dihadapi merupakan diluar dari kekuasaan dari pihak yang bersangkutan.

Esensi implementasi kebijakan yaitu untuk mengetahui dan mengerti efek yang ditimbulkan setelah adanya perumusan rancangan terkait program dan rencana kebijakan (Azizah & Prabawati, 2021). Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan merupakan aktor yang merealisasikan kebijakan menjadi kegiatan atau program sehingga akan didapat hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dalam kebijakan itu sendiri. Menurut Hasanah (2021) Indikator implementasi dilihat berdasarkan dua variable yaitu konteks dan isi sebuah kebijakan. Berdasarkan isi menurut Hasanah (2021) implementasi kebijakan terdiri dari; 1) kebijakan sudah tepat atau belum jika dilakukan; 2) adanya kebijakan dapat menjadi output yang diharapkan sehingga timbul perubahan; 3) dalam sebuah kebijakan perlu adanya implementator kebijakan. Selanjutnya implementasi berdasarkan konteks yaitu; 1) tingkat kepatuhan masyarakat atau implementator; 2) keterlibatan para implementator dalam sebuah kebijakan; 3) karakter organisasi atau instansi.

1.6.2 Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi merupakan salah satu strategi dalam memulihkan perekonomian dikarenakan adanya kejadian tidak terduga seperti bencana (Kemenkeu, 2021). Pemulihan ekonomi dilakukan sebagai salah satu jalan keluar

akibat penurunan aktifitas masyarakat dalam mengatasi ketidakpastian sektor ekonomi atau pendapatan negara (DJKN Kemenkeu, 2020). Tujuan pemulihan ekonomi yaitu mempertahankan, melindungi dan upaya untuk bangkit kembali terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya (Jufra, 2020). Pemulihan ekonomi diharapkan dapat meingkatkan kinerja pe laku usaha, dan dapat kembali berkontribusi terhadap perekonomian nasional (Wibowo et al., 2020).

Pemulihan ekonomi pariwisata mempunyai kontribusi terhadap berbagai target pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* seperti mempunyai pekerjaan yang sesuai/layak dan mingkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesenjangan yang semakin berkurang, serta mempunyai konsumsi dan produksi yang seimbang. Selain itu menurut (Hidayat, 2020) terdapat strategi dalam pemulihan ekonomi pariwisata yaitu seperti; 1) mengaktifkan kembali pasar pariwisata baik domestic dan mancanegara; 2) meninjau kembali sektor pariwisata yang mempunyai kualitas yang bagus tidak hanya pada masa pariwisata saja; 3) Percepatan 5 tempat pariwisata di Indonesia seperti (Lombok, Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo) dan penguatan destinasi wisata Batam/Bintan dan Bali; 4) Menerapkan standart keselamatan dan kebersihan; 5) Mengembangkan pariwisata Tanjung Benoa sebagai salah satu pariwisata yang cocok untuk dikunjungi oleh negara tetangga; 6) penambahan jumlah penerbangan langsung yang menjadi percepatan tempat destinsi pariwisata; 7) meningkatkan kemampuan dan pelatihan yang b erkaitan dengan sektor pariwisata.

Di luar negeri pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara memberi upah yang lebih besar terhadap sektor pekerja, mengembangkan sektor pariwisata, dilakukan relaksasi pinjaman, serta mengembangkan inovasi usah UMKM baik dilakukan secara *digital* atau langsung (Sutrisno, 2020). Pemulihan ekonomi pada suatu negara yang mengalami, krisis, bencana dan dampak yang ditimbulkan harus berkolaborasi terhadap semua pihak untuk memulai kembali peningkatan pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi inflasi terus menerus (Kemenko Perekonomian, 2021). Kolaborasi antar sektor, seperti lembaga, pemerintah daerah dan pusat, perbankan, *marketplace*, *fintech* perlu ditingkatkan kembali untuk pemulihan ekonomi (BKPM, 2021).

Menurut (Yovanda, 2021) teori pemulihan ekonomi memiliki beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Harga Konsumen merupakan gambaran untuk melihat laju inflasi, selain itu laju inflasi digunakan untuk mempertimbangkan penyesuaian gaji, upah, dan kontrak lainnya pada suatu negara.
2. *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur satu indikator bagi sektor ekonomi suatu negara yang dibuat berdasarkan tahapan survei pembelian sebagai sebuah bisnis, selain itu dapat mengindikasikan apakah pelaku usaha dapat optimis terhadap pertumbuhan ekonomi kedepannya.
3. Mobilitas Masyarakat merupakan berpindahnya individu atau kelompok dari strata sosial kelainya. Mobilitas sosial dilakukan karena terdapat berbagai perkembangan teknologi informasi, transportasi dan komunikasi sehingga mudah untuk dilakukan dan sulit dibendung.

1.6.3 Digital Tourism

Digital merupakan sebuah alat yang menjadi pokok kehidupan manusia yang mempunyai cara fleksibel dan kompleks (Warmayana, 2018). Digital juga sering dikaitkan dengan media, karena media memiliki sifat terbarukan/berkembang sehingga saat ini media digunakan sebagai alat *digital* (Retnasary et al., 2019). Teori *Digital* merupakan konsep pemahaman yang berkembang seiring dengan dengan perubahan zaman, selain itu digital memiliki sifat yang semula manual menjadi otomatis/canggih dan semula rumit menjadi lebih praktis (Simanjuntak et al., 2021). *Digital* saat ini berkembang beriringan dengan pariwisata atau *tourism*, perkembangan digitalisasi yang saat ini terjadi memberi manfaat tersendiri terhadap sektor pariwisata, sehingga di era *tourism* 4.0 munculah sebuah istilah *digital tourism* (Mundiyati, 2021).

Salah satu strategi *digital tourism* yaitu untuk memperkenalkan destinasi diberbagai daerah pariwisata melalui, teknologi platform (Kominfo, 2019). *Digital tourism* tidak hanya mengenalkan tempat destinasi wisata namun dapat memperkenalkan potensi wisata baru sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata tertentu (Kemenparekraf, 2021). Perkembangan *digital tourism* tidak terlepas dari teknologi informasi yang semakin berkembang, factor teknologilah yang saat ini sebagai salah satu strategi untuk mempromosikan pariwisata (Retnasary et al., 2019). Pengaplikasian *digital tourism* dapat dilakukan dengan berbagai media sosial seperti intragram, facebook, twiter, tiktok dan lainnya (Dewa & Safitri, 2021).

Bergesernya tatanan kehidupan merubah adaptasi gaya hidup konvensional menjadi digital (Sasongko, 2021). Hal tersebut membuat pemerintah terus upgrade atau mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tatanan kehidupan saat ini (Priasni et al., 2020). Selain mengikuti perkembangan teknologi informasi pemerintah juga mendukung adanya *digital tourism* menggunakan beberapa fasilitas seperti wifi, internet serta *signal coverage* (A & Ihsaniyati, 2020). Dengan hal tersebut diharapkan *digital tourism* mempunyai rancangan yang lebih baik terhadap perkembangan pariwisata. Berkembangnya *digital tourism* dapat memberi efek positif terhadap destinasi wisata dan pertumbuhan ekonomian (Kominfo, 2021).

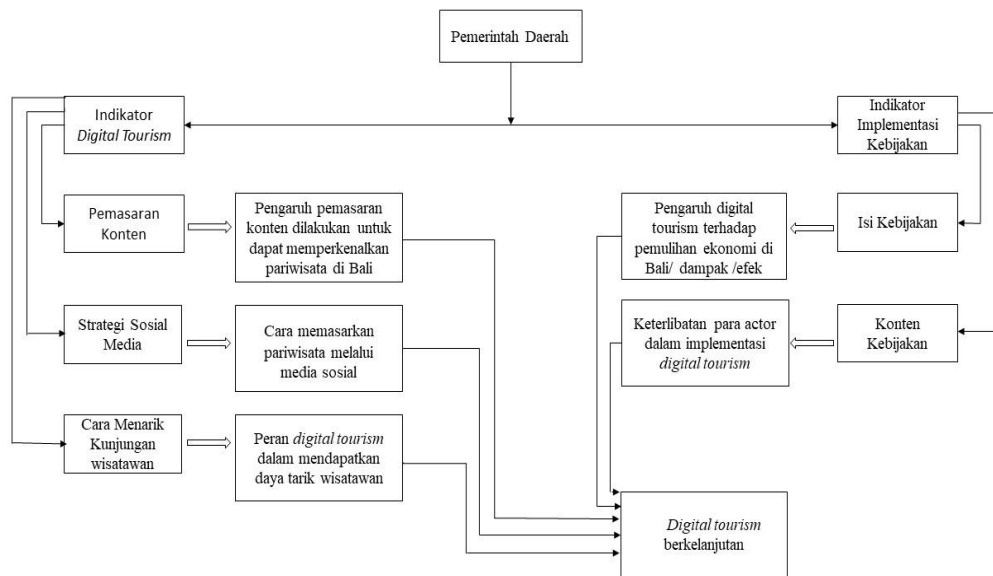
Digital tourism merupakan strategi yang digunakan untuk mempromosikan destinasi wisata melalui berbagai platform, menurut (Lucyantoro & Rachmansyah, 2018) digital marketing memiliki beberapa indikator diantaranya :

1. *Content Marketing* (Pemasaran Konten). Menurut *Content Marketing* adalah sebuah cara menjangkau hubungan dan mempertahankan pelanggan lewat konten-konten yang berbasis kepentingan pelanggan.
2. *Search Engine Marketing* (Teknik Pemasaran Produk) *Search Engine Marketing* adalah sebuah cara mencari informasi produk melalui search engine atau mesin pencari dengan mengetikkan kata atau produk yang akan dibeli.
3. *Sosial Media Strategy* (Strategi Sosial Media) *Sosial Media Strategy* adalah sebuah cara memasarkan produk melalui media sosial, seperti blog, facebook, twitter, dan lain-lain.

4. Konsep *Pull* (Menarik) Merupakan konsep yang menjelaskan bahwa konsumenlah yang aktif dalam pencarian informasi ataupun lainnya mengenai produk yang ingin dibelinya tersebut.
5. Konsep *Push* (Dorong) Merupakan konsep komunikasi yang dilakukan oleh pemasar kepada calon customer atau customer bisa melalui email, *Short Message Service* (SMS) atau (*Really Simple Syndication*) RSS.

Gambar 1.3

Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Aeni (2011)

1.7 Definisi Konseptual

- a. Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan melalui gagasan, konsep, inovasi yang dilakukan melalui tindakan yang dapat memberi perubahan dengan adanya keterampilan, pembelajaran serta pengetahuan.
- b. Pemulihan Ekonomi merupakan satu strategi untuk menemukan jalan keluar diakibatkan penurunan aktifitas masyarakat dalam mengatasi ketidakpastian sektor ekonomi/pendapatan neg ara.
- c. *Digital Tourism* merupakan salah satu strategi pemulihan pariwisata ekonomi dengan menggunakan berbagai platform digital.

1.8 Definisi Operasional

	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Implementasi Kebijakan	Isi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Seberapa besar pengaruh <i>digital tourism</i> terhadap pemulihan ekonomi di Provinsi Bali
		Konteks Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Seberapa besar keterlibatan para aktor (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam implementasi <i>digital tourism</i>• Seberapa besar tingkat aktivitas masyarakat terhadap <i>digital</i>

			<i>tourism</i>
2.	Digital Tourism	Pemasaran Konten	Seberapa besar pengaruh pemasaran konten dilakukan untuk dapat memperkenalkan pariwisata di Provinsi Bali
		Strategi Sosial Media	Seberapa penting cara memasarkan pariwisata melalui media sosial, seperti <i>Instagram</i> dan <i>YouTube</i> .
		Cara Menarik Kunjungan wisatawan	Seberapa besar peran <i>digital tourism</i> dalam mendapatkan daya tarik wisatawan.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *digital tourism* sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomian masyarakat, yang berada pada wilayah kota wisata Provinsi Bali pada masa Pandemi COVID-19. Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, metode kualitatif eksploratif merupakan riset yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis data yang berasal dari berbagai informasi platform kepustakaan yang ada di Internet dalam mendukung penelitian (Heliany, 2019). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali karena wilayah ini merupakan sektor unggulan destinasi wisata di Indonesia, selain itu pariwisata menjadi penyokong perekonomian masyarakat Provinsi Bali. Adanya Pandemi COVID-19

yang terjadi selama dua tahun terakhir membuat ekonomi Provinsi Bali mengalami kontraksi yang cukup kuat. Dari penelitian ini penulis dapat menggambarkan bahwa terganggunya perekonomian di beberapa sektor ekonomi membuat pemerintah melakukan implementasi kebijakan baru untuk memulihkan perekonomian masyarakat Provinsi Bali dengan penggunaan *digital tourism* sebagai salah satu jalan keluar.

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis eksploratif dengan pendekatan deskriptif, metode eksploratif merupakan cara untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh, mendalam dan khusus tentang fenomena segala kompleksitas problem yang terjadi (Urbanus & Febianti, 2017). Penelitian ini mengkaji tentang implementasi *digital tourism* sebagai bentuk upaya pemulihan perekonomian masyarakat, yang berada pada wilayah kota wisata Bali pada masa Pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini akan mengetahui apakah implementasi *digital tourism* dapat dilakukan secara efektif atau tidak dalam pemulihan perekonomian masyarakat selama Pandemi COVID-19.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder, sumber data primer diperoleh dari *website*, *YouTobe* dan media sosial sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi penelitian sebelumnya seperti artikel, buku, berita dan berbagai referensi yang membahas topik yang sama dengan peneliti (Subekan & Iskandar, 2020). Data primer di peroleh dari media online, dokumen pemerintah resmi

Pemerintah Provinsi Bali, *website* pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang berkaitan dengan implementasi *digital tourism* dan pemulihan ekonomi masyarakat selama Pandemi COVID-19. Sumber data sekunder peneliti diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan internasional, buku, dan berbagai berita yang berkaitan dengan *digital tourism*, pemulihan ekonomi dampak COVID-19 dll

1.9.2 Sumber Dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data dan jenis data sebagai berikut;

1. Sumber data yang digunakan yaitu data data kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari literatur, di antaranya adalah buku-buku, artikel, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli dan survei-survei yang mendukung. Sumber data penelitian ini berupa informasi yang diambil dari beberapa media online seperti berita nasional (Kartiningrum, 2015).
2. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti melalui dokumen arsip tertentu, laporan tertulis, buku, artikel, jurnal-jurnal ilmiah, berita, dan *website* resmi pemerintah (H. Hasanah, 2017).

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik penggalian data yang berkaitan dengan alur yang dilakukan dalam menyusun informasi, untuk menyelesaikan permasalahan dan menguji hipotesa peneliti (Wanto &

Windarto, 2017). Untuk melakukan penyelesaian masalah perlu adanya data pendukung penelitian yaitu melalui *study literatur*. Study literatur merupakan komponen penting dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan mengungkap teori yang relevan dengan problem yang ada (Awwabiin, 2021). Selain itu studi literatur mendapat hasil penelitian yang diambil dari berbagai jurnal mengenai pemulihan ekonomi pariwisata, buku tentang implementasi kebijakan dan pemasaran *digital tourism*, serta dokumen yang dianggap sesuai dan relevan terhadap tema penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan website analisis yaitu Bernama Rankwatch. Rankwatch merupakan sebuah *website* yang dirancang untuk mengetahui tingkat aktivitas masyarakat dalam mengakses *website-website* yang akan digunakan sebagai bahan penelitian (affde, 2021). Teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam menghimpun data sebagai berikut:

1. Mengambil data primer berdasarkan *website* analisis dengan melihat jumlah kunjungan *website* dinas pariwisata Provinsi Bali dan menggunakan data sekunder berdasarkan platform berita tentang pemulihan ekonomi dan juga implementasi *digital tourism* dikawasan wisata Provinsi Bali sebanyak 15 artikel berita, untuk melihat keterbaharuan serta informasi terbaru dalam mendukung penelitian.
2. Menggunakan dokumen pemerintah seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tentang laporan statistic kunjungan kunjungan wisatan asing Bali dan okupansi penghuni hotel yang ada di Provinsi Bali dengan time series

2017-2021 (<https://bali.bps.go.id>). Menggunakan dokumen dinas perdagangan koperasi dan UMKM Provinsi Bali tentang pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui PDRB (<https://diskopukm.baliprov.go.id/>) untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan dampak dari pandemi COVID-19.

3. Menggunakan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang dapat diakses melalui (<https://disparda.baliprov.go.id/>). Data diambil terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat dan implementasi *digital tourism* untuk menjadi bahan pertimbangan evaluasi dan implementasi.
4. Menggunakan 50 jurnal nasional dan internasional yang diperoleh dari Scopus dan Google Scholar lalu dianalisa untuk menjadi bahan konfirmasi temuan data penelitian dan menggunakan *time series* mulai tahun 2017-2021.

1.9.4 Teknik Analisis

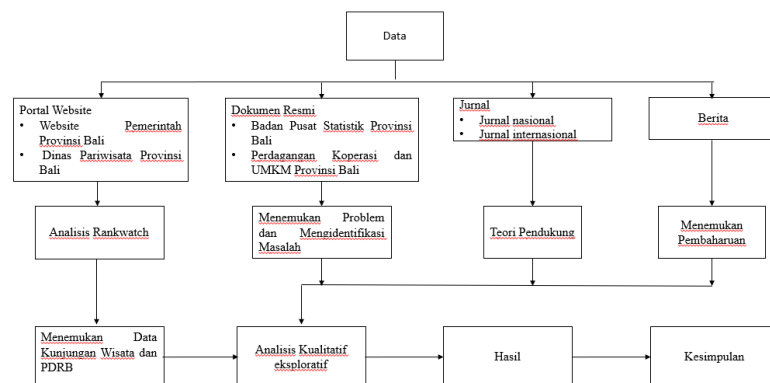
Penelitian ini menggunakan analisis eksploratif pada teknik analisis data yang akan dilakukan yaitu bersifat menyeluruh. Analisis eksploratif merupakan data yang terkumpul diuraikan dan dikelompokan dalam bentuk kalimat logis, berurutan, teratur dan efektif dengan begitu akan memudahkan dalam memahami hasil analisis (Hidayah, 2017). Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis Rankwatch dalam olah datanya. Rankwatch merupakan salah satu *website* yang dirancang untuk mengetahui tingkat aktivitas masyarakat dalam mengakses *website-website* yang akan digunakan sebagai bahan penelitian (affde, 2021)

1.9.5 Metode Pengolahan Data

Analisis pengumpulan data yaitu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul, analisis pengumpulan data tidak memiliki alur linier, menurut (Hartono, 2018) menawarkan bahwa bentuk analisis pengumpulan data terdiri dari tiga tahapan aktifitas; 1) reduksi data; 2) penyajian data; 3) kesimpulan dan verifikasi data.

Gambar 1.4

Metode Pengolahan Data



Sumber: Diolah Penulis (2021)

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyeleksi, menyederhanakan, mentransformasikan serta memfokuskan data penelitian berbentuk transkrip atau catatan (Hartono, 2018). Data yang diperoleh mempunyai cakupan yang luas sehingga perlu adanya pengkategorian dan reduksi data.

Proses pengkategorian data dilakukan secara khusus berdasarkan data yang dipilah sesuai dengan variabel penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur untuk melakukan penyajian data secara sistematis dilakukan dengan pengkategorisasi dalam alur reduksi, selanjutnya data disusun dan diuraikan secara narasi sehingga dapat menjadi dasar dalam berargumentasi (Hartono, 2018). Data yang disajikan berdasarkan pada hasil temuan penelitian yang diperoleh dari Berita Nasional sejumlah 50 Artikel jurnal nasional dan internasional yang diperoleh dari Scopus dan Google Scholar sejumlah 83, Dokumen serta laporan resmi pemerintah dengan rentang waktu data yang dikumpulkan selama tahun 2015-2021.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan alur untuk mendapatkan kejelasan pemahaman terhadap problem penelitian. Menjelaskan dan menentukan kategori data dalam menjawab masalah peneliti (Hartono, 2018). Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah temuan penelitian yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan pada variabel yang selanjutnya dianalisa serta dikomparasikan sehingga menjadi bahan diskusi untuk memperoleh jawaban penelitian.